

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran dalam jangka panjang. kemakmuran itu sendiri ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto atau GDP) adanya keseimbangan antara supply dan demand di pasar (Subandi, 2016).

Keberhasilan pencapaian dari tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita tersebut dapat mencerminkan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mempercepat dan pemeratakan pembangunan. Namun pembangunan diindonesia mengalami permasalahan yang cukup besar karena tidak terjadinya pemerataan pembangunan antar daerah. Karena hal tersebut, pemerintah mengubah sistem yang tadinya sentralisasi yang merupakan pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya

sendiri menjadi sistem pemerintahan desentralisasi. Dengan adanya sistem pemerintahan desentralisasi ini maka muncullah otonomi bagi suatu pemerintahan daerah atau yang biasa dikenal sebagai otonomi daerah.

Berdasarkan UU No 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan, dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU No 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi daerah dengan sumber- sumber daya secara optimal. Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan (Amalia, 2013).

Guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah dalam memaksimalkan pendapatan daerahnya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih dapat mengoptimalkan potensi dari berbagai sektor perekonomian daerahnya. Daerah harus memiliki keunggulan tertentu pada suatu bidang atau sektor yang berbeda dengan daerah lain, sehingga daerah perlu melakukan antisipasi dengan

menentukan sektor apa yang menjadi sektor basis ekonomi dan kemungkinan bisa di kembangkan pada masa yang akan datang (suyatno, 2000).

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dengan kemakmuran masyarakat. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi (sukirno, 1994).

Struktur perekonomian di suatu wilayah dapat menunjukkan kontribusi atau sumbangan dari masing-masing sektor. Apabila kontribusi pada suatu sektor besar maka dapat dikatakan bahwa sektor tersebut memiliki potensi yang tinggi dalam perekonomian, sedangkan kontribusi yang kecil menunjukkan bahwa sektor tersebut kurang berpotensi dalam perekonomian di wilayah tersebut. Dengan demikian besarnya kontribusi dapat menggambarkan peran sektor dalam perekonomian. Semakin besar peranan sektor maka dapat dikatakan bahwa sektor

tersebut sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah. Dalam hal ini salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu wilayah adalah Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product atau GDP) untuk tingkat nasional dan untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator lain adalah tingkat pertumbuhan, pendapatan perkapita, dan pergeseran atau perubahan struktur ekonomi (Sjafrizal, 2014). Sehingga untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan dari potensi yang dimiliki tersebut, maka perhatian utama ditujukan untuk melihat komposisi ekonomi yaitu dengan mengetahui sumbangan atau peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB.

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa dimana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di Negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi moderen secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan dalam ekonomi yang berkaitan dengan komposisi penyerapan tenaga kerja, produksi, perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus menerus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pendapatan perkapita (Chenery, 1989)

Analisis tentang struktur ekonomi daerah juga dapat digunakan untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan pembangunan daerah dengan cara melihat dari

kemajuan perubahan struktur ekonomi daerah bersangkutan. Suatu perekonomian dapat dikatakan maju apabila kontribusi sektor industri lebih besar dari pada sektor pertanian dan jasa begitu pula sebaliknya alasannya karena sektor industri merupakan kegiatan ekonomi yang sudah maju dan menggunakan teknologi modern sehingga tingkat produktivitas kerja menjadi lebih tinggi (sjafrizal, 2014).

Produk Domestik Regional Bruto pada dasarnya merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah secara definitif, PDRB tersebut pada dasarnya adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah pada periode tertentu. PDRB juga dapat menggambarkan suatu daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya yaitu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Maka dari itu, besaran PDRB dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi dari faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting dalam melihat total output akhir barang dan jasa yang dihasilkan perekonomian suatu wilayah (sjafrizal, 2014). Selain itu tingkat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat suatu wilayah tercermin pada data PDRB. Angka PDRB digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional, khususnya ekonomi. Selain itu indikator makro ekonomi ini juga digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2019).

Berikut ini adalah struktur yang menyumbang peranan dalam PDRB Provinsi Gorontalo yaitu: pertanian, kehutanan, perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan, minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estat; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2019).

Tabel 1.1 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Di Provinsi Gorontalo 2015-2019 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8024613.46	8540359.89	9314368.26	10022052.25	10655570.58
B. Pertambangan dan Penggalian	294305.31	294530.16	308408.31	318410.36	334403.11
C. Industri Pengolahan	883129.26	941228.57	973800.69	1039434.99	1160192.93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	15550.23	17422.44	18899.28	20621.82	22387.76
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10497.75	12064.06	14028.42	15838.67	17993.63
F. Konstruksi	2711553.28	2849810.70	2920426.95	2992209.69	3063720.46
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2275217.19	2500611.58	2740504.81	3018054.07	3376687.31
H. Transportasi dan Pergudangan	1324735.68	1409918.94	1484978.43	1554359.56	1626504.71
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	482903.25	524978.44	580729.59	625797.00	667078.99
J. Informasi dan Komunikasi	644774.35	710706.27	785821.15	862999.72	930476.72
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	817903.70	968833.80	1064488.37	1108300.29	1116529.00
L. Real Estate	428831.70	464446.76	489178.54	516514.55	558872.54
M,N. Jasa Perusahaan	21315.56	22574.27	23818.57	25159.51	26583.90
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1978585.73	1976606.44	1978284.11	2016070.84	2069631.24
P. Jasa Pendidikan	958613.98	994827.90	1056574.09	1155240.38	1262788.71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	803683.80	871815.76	914888.60	992884.41	1084808.20
R,S,T,U. Jasa lainnya	392588.38	406473.03	420932.48	437325.70	458636.87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22068802.61	23507209.01	25090130.64	26721273.81	28432866.65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	22068802.61	23507209.01	25090130.64	26721273.81	28432866.65

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo 2019

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dari tahun ke tahun agregat PDRB ADHK di Provinsi Gorontalo membentuk pola yang hampir sama setiap tahunnya tampak bahwa sub sektor pertanian kehutanan dan perikanan terus menjadi penopang utama dengan total kontribusi yang sebesar 10,655,570 milliar rupiah atau 37,48%

pada tahun 2019. Setelah itu sektor kedua yang memiliki kontribusi cukup besar yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang sebesar 3,376,687 miliar rupiah atau 11,88%. Maka dari itu sektor pertanian kehutanan dan perikanan yang paling banyak memberikan kontribusinya untuk perekonomian di wilayah Provinsi Gorontalo dibandingkan sector lainnya. Mengingat bahwa sektor pertanian kehutanan dan perikanan sebagai sector unggulan dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Gorontalo belum dapat secara maksimal meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat maka dibutuhkan kontribusi yang lebih besar lagi dari sektor ekonomi lainnya seperti sektor industri dan sektor lainnya yang dapat terus di tingkatkan lagi kotribusinya terhadap PDRB di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan terhadap sektor industri dan sektor potensial lainnya guna dapat mendorong meningkatnya perekonomian di Provinsi Gorontalo Maka dari itu, pemerintah harus mengetahui bagaimana perubahan struktur ekonomi yang terjadi didaerah. untuk mengetahuinya pemerintah harus melakukan analisis terhadap perubahan struktur ekonomi yang terjadi didaerah dengan membandingkannya dengan nasional. Dan dengan adanya penelitian yang dilakukan, maka diharapkan pemerintah dapat mengetahui mana yang sektor basis dan non basis serta perkembangannya agar dapat mengetahui sektor sektor mana yang harus lebih di tingkatkan.

Berdasarkan dengan masalah diatas maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu **“ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI PROVINSI GORONTALO”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, kita dapat mengidentifikasi masalah yang terjadi di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut

1. Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo masih menitikberatkan pada sektor pertanian sebagai pendorong kehidupan ekonomi masyarakat
2. Provinsi Gorontalo masih dalam masa perkembangan untuk melakukan pengembangan serta perubahan bidang bidang atau struktur ekonomi agar menjadi lebih maju

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas maka akan timbul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana arah perkembangan struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo?
2. Sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis yang ada di Provinsi Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat arah perkembangan sektor ekonomi di Provinsi Gorontalo
2. Untuk menganalisis sektor basis dan non basis terhadap PDRB Provinsi Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan telaah terhadap perubahan struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo
- b. Bagi peneliti sebagai wahana latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang peneliti dapatkan di perkuliahan

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Pemerintah dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan mengeluarkan kebijakan yang dilihat dari perubahan struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo
- b. Manfaat bagi penulis dapat mengetahui banyak hal mengenai perubahan struktur ekonomi di Provinsi Gorontalo